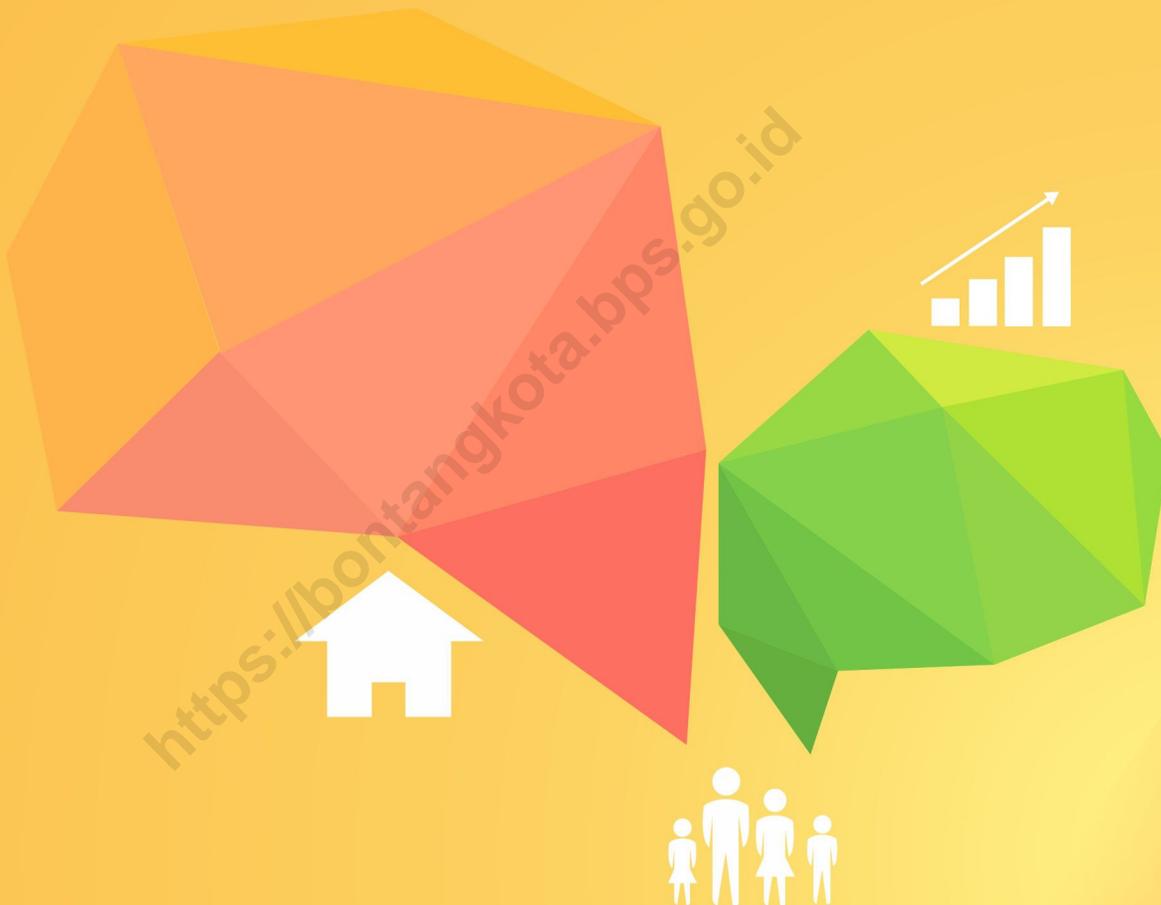




INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KOTA BONTANG **2010-2014**



**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KOTA BONTANG 2010-2014
(METODE BARU)**

Nomor Katalog : 1413.6474

Nomor Publikasi : 64745. 1405

Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan
Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kota
Bontang

Diterbitkan Oleh : BPS Kota Bontang

© 2014 : **Badan Pusat Statistik Kota Bontang**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berkat, anugerah serta Karunia-Nya yang melimpah sehingga publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang Tahun 2014 dapat kembali diterbitkan.

Publikasi ini merupakan publikasi berkelanjutan dari tahun sebelumnya yang disusun sebagai kerangka perencanaan dengan memanfaatkan paradigma pembangunan manusia sebagai titik strategis dalam pembangunan. Diharapkan publikasi ini dapat berfungsi sebagai input di dalam perencanaan, penyusunan kebijakan pemerintah Kota Bontang, dan "Terwujudnya Masyarakat Bontang yang berbudi luhur, maju adil dan sejahtera".

Semoga publikasi ini bermanfaat, terutama untuk keperluan evaluasi dan perencanaan pembangunan di wilayah Kota Bontang. Kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam memberikan data dan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan publikasi ini sehingga dapat diterbitkan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Bontang, Oktober 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Bontang,

Drs. H. Basiran Suwandi
NIP. 19601005 198203 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	5
1.3 Fungsi, Lingkup Dan Keterbatasan	7
Bab 2 Formula Dan Metode Perhitungan.....	11
2.1 Pengukuran Ipm	11
2.1.1. Angka Harapan Hidup (E0)	18
2.1.2. Rata-Rata Lama Sekolah (Mys) Dan Angka Harapan Lama Sekolah (Eys)	20
2.1.3. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ppp).....	21
2.1.4. Pertumbuhan Ipm	23
2.2 Beberapa Definisi Operasional Indikator Terpilih	24
Bab 3 Gambaran Umum Kota Bontang	29
3.1 Kondisi Umum Wilayah.....	29
3.2 Kondisi Sosial	30
3.2.1 Kependudukan	30
3.2.2 Gambaran Pendidikan.....	34
3.2.3 Gambaran Kesehatan	44

3.2.4	Gambaran Ketenagakerjaan	50
3.2.5	Gambaran Perekonomian	58
Bab 4	Status Pembangunan Manusia	70
4.1	Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang	71
4.1.1	Angka Harapan Hidup	73
4.1.2	Angka Harapan Lama Sekolah(Eys).....	75
4.1.3	Rata-Rata Lama Sekolah	78
4.1.4	Rata-Rata Pengeluaran Riil	80
4.2	Perkembangan IPM Kota Bontang 5 Tahun Terakhir	84
4.3	Kecepatan Mencapai Angka IPM Ideal (Reduksi Shortfall)	85
4.4	Keterbandingan IPM Antar Kab/Kota di Provinsi Kaltim	87
Bab 5	Penutup	92
5.1	Kesimpulan	92
5.2	Saran	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Indikator IPM	17
Tabel 2.2. Konversi Tahun menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	21
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin, Kota Bontang Tahun 2010- 2014.....	31
Tabel 3.2. Struktur Umur Penduduk dan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) Kota Bontang Tahun 2010-2014.....	33
Tabel 3.3. Jumlah Sekolah di Kota Bontang, Tahun 2010-2014.....	37
Tabel 3.4. Rasio Murid–Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2014.....	38
Tabel 3.5. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Kota Bontang Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2009-2014.....	40
Tabel 3.6. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD, SLTP, dan SMU/SMK Kota Bontang, Tahun 2014.....	42

Tabel 3.7. Rata-rata Jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) yang Dimiliki oleh Setiap Penduduk Wanita Kota Bontang yang Pernah Menikah, Tahun 2010—2014	48
Tabel 3.8. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan, Tahun 2013—2014	50
Tabel 3.9. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Kota Bontang Tahun 2009—2014	52
Tabel 3.10. Indikator Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2012—2014	54
Tabel 3.11. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Kota Bontang Tahun 2012—2014	57
Tabel 3.12. Perkembangan dan Laju Pertumbuhan PDRB Migas dan Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2010—2014	60
Tabel 3.13. Struktur Perekonomian Kota Bontang Dengan Migas Tahun 2014	65
Tabel 3.14. Distribusi Persentase PDRB Tanpa Migas Kota Bontang Tahun 2013	66
Tabel 3.15. Perkembangan PDRB Per Kapita Dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang Tahun 2010 – 2014 (Ribu Rupiah)	68

Tabel 4.2. Perbandingan Reduksi Shortfall IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013-2014.....	86
Tabel 4.3. Indikator Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Dirinci menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2014.....	91

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kota Bontang Tahun 2010—2014.....	32
Grafik 2. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Kota Bontang Tahun 2009—2014.....	53
Grafik 3. Laju Pertumbuhan PDRB Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2011—2014	63
Grafik 6. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2013—2014	74
Grafik 7. Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2013-2014	76
Grafik 8. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur Tahun 2013-2014	79
Grafik 9. Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita Kabupaten/Kota di Kalimantan, Tahun 2014	81
Grafik 10. Perkembangan IPM Kota Bontang, Tahun 2010-2014	85
Grafik 11. Keterbandingan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2013-2014	88

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), dan peningkatan pendidikan (kemampuan proses capaian pendidikan, keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia terdiri atas empat komponen utama, yaitu sebagai berikut.

1. Produktivitas

Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian pembangunan manusia.

2. Ekuitas

Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalamnya dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan itu.

3. Kestinambungan

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, dan lingkungan hidup, harus dilengkapi.

4. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat; pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan,

kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu jender. Dengan demikian, pembangunan manusia bukan hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Publikasi *Human Development Report* (HDR) yang diterbitkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan pesan utama yang dikandung oleh setiap laporan pembangunan manusia baik di tingkat global, nasional, maupun daerah, yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Dengan demikian harus ada peningkatan cara pandang yang dulunya pembangunan di Indonesia hanya dilihat dari peningkatan bidang ekonomi semata, juga ke arah pembangunan manusia melalui strategi pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan manusia (*human development*) didefinisikan sebagai perluasan pilihan-pilihan bagi penduduk, yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pembangunan manusia harus dipacu untuk menjadi semacam model

pembangunan dimana penduduk merupakan sasaran utama untuk dikembangkan dan ditingkatkan kualitas hidupnya. Di antaranya berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya, sehingga dapat diciptakan peluang kerja melalui perluasan dan produktivitas (pertumbuhan) ekonomi dalam negeri sehingga penduduk diberdayakan dalam menentukan harkat martabat manusia pada partisipasi pembangunan. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan ketrampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan/keterampilan mereka tersebut. Konsep pembangunan di atas jauh lebih luas pengertiannya jika dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan dan pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*). Model pembangunan manusia adalah suatu model pembangunan yang memiliki konsep lebih luas dari pada model dengan pendekatan pembangunan SDM, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan. Konsep pembangunan manusia lebih komprehensif dan bersifat holistik.

Pilihan kebutuhan manusia tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu.

Namun di antara sejumlah pilihan ini, ada tiga pilihan yang sangat esensial untuk dipenuhi yaitu, pilihan untuk hidup sehat dan berumur panjang, pilihan untuk memiliki ilmu pengetahuan, dan pilihan untuk mempunyai akses ke berbagai sumber yang diperlukan agar dapat memenuhi standar kehidupan yang layak (*a decent standard of living*). Apabila ketiga pilihan mendasar tersebut dapat dipenuhi maka seseorang akan mudah meningkatkan kemampuannya dalam aktifitas sehari-hari serta memiliki kemampuan menangkap peluang yang ada untuk meningkatkan kehidupannya.

Agar konsep pembangunan manusia dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan, maka pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. Sejak tahun 1990 *United Nations* (PBB) telah memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) sebagai alat untuk mengukur/mengontrol pembangunan manusia melalui suatu model untuk melihat pemberdayaan manusia.

1.2 TUJUAN

Berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), IPM dipakai untuk

melihat kondisi dan potensi pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan manusia. IPM merupakan indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan perbandingan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah, khususnya di Kota Bontang tahun 2014.

Penghitungan indeks pembangunan manusia sampai ke tingkat kabupaten/kota adalah sangat penting karena proses desentralisasi (otonomi daerah) yang sedang berjalan di Indonesia saat ini merupakan pemindahan sebagian besar proses pembangunan dari pemerintah pusat ke tangan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Untuk itu tentunya dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi setempat (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi) dengan dukungan data-data yang lebih memadai untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penghitungan IPM 2014 merujuk pada rekomendasi UNDP tentang penghitungan IPM Metode Baru 2010, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih terarah pada keadaan pembangunan manusia terkini di kota Bontang. Penghitungan IPM 2014 juga berguna untuk melihat capaian pembangunan manusia di Kota Bontang pada tahun 2014 dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan perumusan arah kebijakan oleh pemerintah, sehingga

diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih terarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.

1.3 FUNGSI, LINGKUP DAN KETERBATASAN

IPM adalah indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. IPM mencoba menggambarkan pembangunan manusia atau mutu hidup ke dalam suatu angka indeks. Merupakan suatu kemustahilan jika pembangunan manusia dalam arti luas dapat diukur hanya dengan suatu indeks komposit, tak peduli berapa banyak komponen indikatornya (apalagi mengingat bahwa makin banyak variabel yang dimasukkan ke dalam indeks komposit, makin besar pula kemungkinan *error* yang dapat ditimbulkan).

IPM juga masih memiliki kelemahan lain yaitu dari segi data dan arti. Dari segi data, kelemahannya terletak pada definisi/konsep dan kualitas data yang digunakan antar daerah maupun antar negara sangat beragam, sehingga mengurangi kekuatan IPM sebagai alat banding di tingkat internasional. IPM juga membutuhkan indikator yang kuantitatif, sehingga untuk

beberapa hal IPM mempunyai kelemahan karena tidak mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan output ketiga komponen di sebuah negara berkembang. Kelemahan lain yang bersifat umum dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual.

Akan tetapi di balik kelemahannya, fungsi IPM sebagai sarana untuk menarik perhatian masyarakat terhadap masalah pembangunan manusia telah diakui secara luas. *Statistical Institute for Asia and The Pasific* (SIAP) merekomendasikan negara anggotanya untuk menghitung IPM sebagai alat perbandingan antar wilayah di dalam suatu negara, karena pada umumnya definisi/konsep sistem perstatistikan wilayah-wilayah dalam satu negara relatif sama sehingga kualitas data yang dihasilkan pun sama.

Setelah diperkenalkannya IPM pada tahun 1990, pada tahun 1995 UNDP memperkenalkan dua jenis indeks pembangunan manusia yang berkaitan dengan jender yaitu (1) *Gender Related Development Index* (GDI) atau indeks pembangunan jender (IPJ); dan (2) *Gender Emporment Measure* (GEM) atau indeks pemberdayaan jender (IDJ). IPJ seperti halnya IPM merupakan suatu indeks komposit yang diharapkan dapat merefleksikan capaian upaya keseluruhan pembangunan manusia. Berbeda dengan IPM,

penghitungan IPJ memperhatikan ketidaksamaan jender. Telah diakui secara luas bahwa suatu faktor krusial bagi keberhasilan upaya pembangunan manusia adalah pemberdayaan jender. Sebagai upaya agar faktor tersebut dapat dilihat maka UNDP mengembangkan IDJ. Indeks komposit ini menggunakan variabel yang secara eksplisit mengukur pemberdayaan relatif laki-laki dan wanita dalam wilayah aktivitas politik dan ekonomi.

HDI dan ukuran-ukuran lain yang telah dikemukakan digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia secara rata-rata, tetapi tidak mengukur kesenjangan manusia (*human deprivations*). Untuk mengisi kesenjangan ini, pada tahun 1997 UNDP memperkenalkan indeks kemiskinan manusia (IKM) atau *Human Poverty Index* (HPI). Indeks ini mencoba mengungkap deprivasi yang terjadi. Komponen IKM adalah (1) persentase penduduk yang tidak mampu bertahan hidup (meninggal) hingga umur 40 tahun sebagai refleksi dari deprivasi hidup sehat dan panjang umur; (2) persentase penduduk dewasa yang buta huruf sebagai refleksi dari deprivasi di bidang pendidikan (dalam IPM metode baru 2010 menjadi pencapaian tingkat pendidikan), dan (3) akses kepada pembangunan kesehatan, air bersih dan persentase balita yang kurang gizi. Indeks komposit dari ketiganya

mewakili deprivasi dari keseluruhan yang terkait dengan ekonomi. Bila IPM mengukur pencapaian rata-rata pada setiap kompenennya, maka indeks kepuasan masyarakat/IKM mengukur *magnitude* (arah) dan deprivasi (kesenjangan).

Dengan diterbitkannya *Human Development Report* (HDR) – *Human Development Index* (HDI) oleh UNDP akan memudahkan para pembuat kebijakan untuk mengukur pembangunan manusia. Hal ini disebabkan antara lain oleh kesederhanaan metode penghitungannya, bersifat global, tidak terlalu rinci, dan merupakan kombinasi komponen sosial dan ekonomi. Dalam era otonomi daerah, prioritas pembangunan perlu benar-benar diarahkan pada kelompok penduduk, daerah dan sektor yang paling kritis untuk mendapat perhatian. Apalagi kalau dana daerah otonom tersebut sangat terbatas sehingga alokasinya perlu disusun seefisien mungkin. Oleh karena itu kehadiran HDR dan HDI menjadi lebih strategis bagi para pembuat kebijakan di kabupaten/kota.

BAB 2

FORMULA DAN METODE PERHITUNGAN

2.1 PENGUKURAN IPM

Dalam Human Development Report (Laporan Pembangunan Manusia) yang pertama pada tahun 1990 mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk membuat manusia mampu mempunyai lebih banyak pilihan. Pendapatan adalah salah satu dari pilihan yang dimiliki manusia, tetapi bukanlah suatu totalitas dari semua aspek kehidupan manusia, pilihan yang tidak kalah penting adalah pilihan kesehatan, pengetahuan, lingkungan fisik yang baik dan kebebasan untuk bertindak. Dengan adanya pilihan-pilihan tersebut diharapkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia tersebut.

Untuk mengetahui status dan kemajuan pembangunan manusia (UNDP; 1990) ukuran umum yang dipakai adalah Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit yang dapat mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah dalam tiga dimensi indikator komponen pilihan dasar yaitu :

- (1) Lamanya hidup adalah hidup sehat dan umur panjang yang diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir.
- (2) Pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan rata-rata antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan
- (3) Standar kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita atau Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) per kapita.

Indikator merupakan petunjuk yang memberikan indikasi tentang suatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut. Indikator IPM yang dipilih cukup sensitif dan dapat berperan sebagai refleksi tentang fenomena perkembangan manusia. Dalam pemilihan indikator mendasarkan pada pendekatan masukan (input) dan pendekatan hasil (output). Pendekatan masukan sebagai variabel yang mempengaruhi dan pendekatan hasil sebagai variabel yang dipengaruhi. Indikator yang dipengaruhi disebut sebagai indikator inti dan indikator yang mempengaruhi disebut sebagai indikator sektoral.

Dalam penghitungan IPM tahun 2014 BPS secara nasional melaksanakan upgrading metodologi

penghitungan Angka IPM, hal ini dilakukan dengan beberapa alasan, antar lain :

- Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi (mendekati 100%), sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
- PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Perubahan yang terjadi adalah pada indikator yang mendasari perhitungan IPM dan metode agregasi penghitungan yang digunakan. Indikator Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, dan PDRB perkapita diganti dengan PNB perkapita. Sedangkan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Dengan perubahan ini diharapkan dapat menjadi indeks yang

diskriminatif (dapat membedakan kondisi antar daerah dengan baik). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Sementara PNB menggantikan PDB/PDRB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Kemudian perubahan dalam metode agregasi lebih memungkinkan untuk mencapai pembangunan manusia yang baik tidak bisa hanya mengandalkan salah satu dimensi dasar saja tetapi ketiga dimensi dasar tersebut harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan :

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\text{min}}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\text{min}}}$$

Dimensi Pendidikan :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$
$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$
$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran :

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Dengan metode penghitungan yang baru maka data-data yang dapat diimplementasikan dalam metode penghitungan baru tersebut adalah sebagai berikut:

1. Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010 (SP2010), Proyeksi Penduduk.
2. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di peroleh dari sumber data hasil (Survei Sosial Ekonomi Nasional/ SUSENAS)
3. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS merujuk pada 96 komoditas dari sebelumnya hanya 27 komoditi.
4. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali pengeluaran per kapita sebagai refleksi hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Dalam menghitung IPM/Indeks Pembangunan Manusia, diperlukan Nilai Maksimum dan Minimum untuk masing-masing indikator berikut tabel yang menyajikan nilai-nilai komponen tersebut, sebagai berikut :

Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Indikator IPM

Komponen IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]
Angka Harapan Hidup	85	20	Standar UNDP
Harapan Lama Sekolah	18	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah (thn)	15	0	UNDP menggunakan <i>combined gross enrolment ratio</i>
Paritas Daya Beli	26.572.352 ^{a)} (Rp.)	1.007.436 ^{a)} (Rp.)	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

^{a)} daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten (Jaksel) yang diproyeksikan hingga 2025

^{b)} daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (Tolikara)

^{*}) Nilai maksimum dan minimum sesuai dengan ketentuan UNDP (1994; 108) kecuali untuk Purchasing Power Parity (PPP)

Penetapan nilai tersebut memberikan keuntungan antara lain bahwa angka IPM yang dihasilkan :

- (1) Dapat dibandingkan antar waktu (karena angka ideal tidak akan tercapai oleh IPM suatu daerah dalam waktu dekat)
- (2) Dapat diletakkan dalam skala nasional bahkan internasional karena 3 dari 4

komponen yang digunakan berlaku secara internasional.

Tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah oleh UNDP dibagi ke dalam tiga golongan yaitu rendah (kurang dari 50), sedang atau menengah (antara 50-80), dan tinggi (80 ke atas). Sedangkan untuk keperluan perbandingan antar kabupaten/kota tingkatan status menengah dipecah lagi menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas. Dengan demikian kriteria tingkatan status pembangunan manusia sebagai berikut :

Tingkatan Status	Kriteria
Rendah	$IPM < 60$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$

2.1.1. Angka Harapan Hidup (e_0)

Indikator angka harapan hidup merupakan salah satu dimensi dasar pembangunan manusia khususnya di bidang kesehatan yang diharapkan dapat mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat” dalam masyarakat.

Untuk mengukur lama hidup, BPS menggunakan ukuran atau indikator angka harapan hidup waktu lahir atau life expectancy at birth (e_0) yaitu rata-rata perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Tampaknya tidak ada yang meragukan e_0 sebagai ukuran usia hidup. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa disperspektif konsep pembangunan manusia yang ingin diukur sebenarnya tidak hanya dari segi usia panjang sebagaimana terefleksikan dalam e_0 , tetapi juga segi “sehat”. Tetapi yang terakhir ini sulit dioperasionalkan.

Meningkatnya angka harapan hidup dapat diartikan adanya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang biasanya ditandai dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, membaiknya kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, karena UNDP juga menggunakan e_0 sebagai IPM global maka angkanya dapat dibandingkan secara internasional.

Angka e_0 yang digunakan untuk menghitung IPM Tahun 2014 bersumber dari data Sensus Penduduk 2010 dan proyeksi penduduk.

2.1.2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.2 Konversi Tahun menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Lama Sekolah (tahun)
[1]	[2]
1. Tidak/belum pernah sekolah	0
2. Sekolah Dasar (SD)	6
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	9
4. Sekolah Menengah (SMU & yang sederajat)	12
5. Diploma I (DI)	13
6. Diploma II (DII)	14
7. Akademi/Diploma III (DIII)	15
8. Diploma IV/Sarjana	16
9. S2	18
10. S3	21

2.1.3. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (PPP)

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Tabel 2.3. Tahapan Penghitungan Pengeluaran Riil Disesuaikan



Penghitungan Paritas Daya Beli

Dihitung dari bundel komoditas makanan dan nonmakanan.



Persentase terhadap total pengeluaran rumah tangga

Rumus Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP)

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

p_i : harga komoditas i di kab/kota j
 p_k : harga komoditas i di Jakarta Selatan
 m : jumlah komoditas

2.1.4. Pertumbuhan IPM

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, perlu diperhatikan tingkat kemajuan pembangunan manusia. Aspek yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia tersebut selain membandingkan antar wilayah atau posisi suatu wilayah relatif terhadap wilayah yang lain berdasarkan besaran IPM adalah mengkaji dari pencapaian setelah berbagai program diimplementasikan dalam suatu periode tertentu.

Perbedaan laju perubahan IPM selama periode waktu tertentu dapat diukur dengan menggunakan rata-rata reduksi shortfall per tahun (Annual Reduction in Shortfall). Nilai "shortfall" secara sederhana mengukur keberhasilan dipandang dari segi jarak antara apa yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai, yaitu jarak dengan nilai maksimum. Kondisi ideal yang dapat dicapai adalah nilai IPM sama dengan 100. Nilai reduksi shortfall yang lebih besar menandakan peningkatan IPM

yang lebih cepat. Pengukuran ini didasarkan pada asumsi bahwa laju perubahan tidak bersifat linier, tetapi laju perubahan cenderung melambat pada tingkat yang lebih tinggi.

Cara penghitungan “Shortfall” dinyatakan dengan rumus:

$$\left[\frac{IPM_{(t+n)} - IPM_{(t)}}{IPM_{(ref)} - IPM_{(t)}} \times 100 \right]^{1/n}$$

Dimana :

$IPM_{(t)}$: IPM pada tahun ke t

$IPM_{(t+n)}$: IPM tahun ke $t+n$

IPM_{ref} : IPM acuan (biasanya IPM ideal)

2.2 BEBERAPA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TERPILIH

Untuk dapat melihat dengan jelas dan terarah beragam persoalan pembangunan manusia selama ini serta bagaimana mengimplementasikan program-program pembangunan secara benar dan terukur diperlukan adanya suatu ukuran indikator yang reliable dan handal. Berikut beberapa definisi operasional yang sering digunakan dalam hal pembangunan manusia :

- ✓ **Rasio jenis kelamin:** Perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dikalikan 100.

- ✓ **Angka ketergantungan:** Perbandingan antara jumlah penduduk usia < 15 tahun ditambah usia > 65 tahun terhadap penduduk usia 15 - 64 tahun, dikalikan 100.
- ✓ **Rata-rata Lama Sekolah:** penduduk usia 25 tahun ke atas.
- ✓ **Harapan Lama Sekolah:** harapan penduduk usia 7 tahun ke atas untuk dapat bersekolah.
- ✓ **Angka Partisipasi Murni SD:** Proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD.
- ✓ **Angka Partisipasi Murni SLTP:** Proporsi penduduk usia 13 - 15 tahun yang sedang bersekolah di SLTP.
- ✓ **Angka Partisipasi Murni SLTA:** Proporsi penduduk usia 16 - 18 tahun yang sedang bersekolah di SLTA.
- ✓ **Jumlah penduduk usia sekolah:** Banyaknya penduduk yang berusia antara 7 sampai 24 tahun.
- ✓ **Bekerja:** Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

- ✓ **Angkatan Kerja:** Penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.
- ✓ **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja:** Perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun.
- ✓ **Angka Pengangguran Terbuka:** Perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja.
- ✓ **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri:** Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas dengan status berusaha sendiri.
- ✓ **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tidak tetap:** Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tak dibayar.
- ✓ **Persentase pekerja dengan status berusaha dengan buruh tetap:** Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas yang berusaha dengan buruh tetap.
- ✓ **Persentase pekerja dengan status berusaha pekerja tak dibayar:** Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status pekerja keluarga.
- ✓ **Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis:** Proporsi balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya).

- ✓ **Angka Harapan Hidup waktu lahir:** Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk.
- ✓ **Angka Kematian Bayi:** Besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup.
- ✓ **Persentase rumah tangga beratap layak:** Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan atap layak (atap selain dari dedaunan).
- ✓ **Persentase rumah tangga berpenerangan Listrik:** Proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik.
- ✓ **Persentase rumah tangga bersumber air minum leding:** Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum leding.
- ✓ **Persentase rumah tangga bersumber air minum bersih:** Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum pompa / sumur / mata air yang jaraknya lebih besar dari 10 meter dengan tempat penampungan limbah kotoran terdekat.
- ✓ **Persentase rumah tangga berjamban dengan tangki septik:** Proporsi rumah tangga yang mempunyai jamban dengan tangki septik.
- ✓ **Penduduk Miskin:** Penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan

makanan setara 2100 kalori dan kebutuhan non makanan yang mendasar.

- ✓ **Garis Kemiskinan:** Suatu batas dimana penduduk dengan pengeluaran kurang dari batas tersebut dikategorikan sebagai miskin. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu komponen batas kecukupan pangan (GKM) dan komponen batas kecukupan non makanan (GKNM).

BAB 3

GAMBARAN UMUM KOTA BONTANG

3.1 KONDISI UMUM WILAYAH

Secara geografis Kota Bontang terbentang pada 117°22' sampai 117°32' Bujur Timur serta di antara 0°01' sampai 0°112' Lintang Utara. Wilayah Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah datar, landai, dan berbukit. Luas Kota Bontang sekitar 497,57 km² yang sebagian besarnya merupakan lautan yaitu 70,29 persen dan sisanya 29,71 persen merupakan wilayah daratan atau seluas 147,8 km².

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kota Bontang dibagi secara berjenjang menjadi 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Kecamatan Bontang Selatan memiliki wilayah daratan paling luas (104,40 km²), disusul oleh Kecamatan Bontang Utara (26,20 km²) dan Kecamatan Bontang Barat (17,20 km²).

Secara administrasi, semula Kota Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai, lalu menjadi Daerah Otonom

berdasarkan Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Batasan administratif Kota Bontang adalah sebagai berikut.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.

3.2 KONDISI SOSIAL

3.2.1 KEPENDUDUKAN

Pada tahun 2014, jumlah penduduk Kota Bontang mengalami pertumbuhan sebesar 2,39 persen jika dibandingkan dengan tahun 2013, yaitu menembus angka 159.614 jiwa. Komposisi penduduk Kota Bontang tahun 2014 terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 83.641 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 75.974 jiwa.

Gambaran selama enam tahun terakhir menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih

lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (RJK) penduduk Kota Bontang pada tahun 2014 adalah sekitar 110 atau dengan kata lain terdapat 110 orang penduduk laki-laki di antara 100 orang penduduk perempuan. Adapun gambaran perkembangan jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 6 dan Grafik 1 di bawah ini.

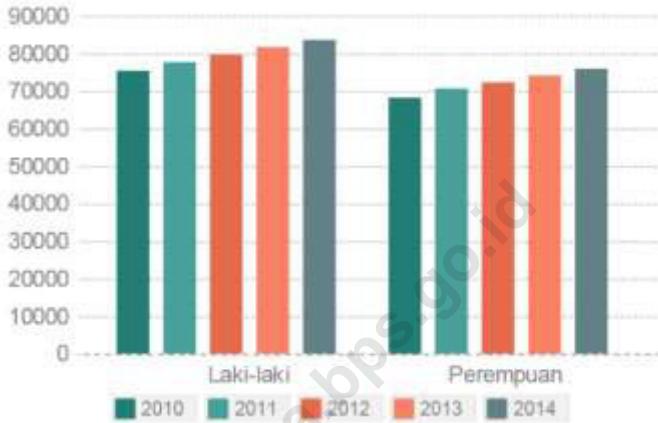
[

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin, Kota Bontang Tahun 2010—2014

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	RJK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	75.422	68.261	143.683	110
2011	77.714	70.697	148.412	110
2012	79.723	72.366	152.089	111
2013	81.718	74.162	155.880	110
2014	83.641	75.974	159.614	110

Sumber : BPS Kota Bontang

Grafik 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kota Bontang Tahun 2010—2014



Keberhasilan pembangunan di suatu daerah salah satunya dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur, yang dicerminkan oleh makin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (usia 0—14 tahun dan usia 65 tahun ke atas), atau dengan kata lain angka beban tanggungan menurun.

Tabel 7 di bawah ini memperlihatkan bahwa penduduk usia muda (0—14 tahun) pada tahun 2014 adalah sebanyak 49.148 jiwa, atau mengalami kenaikan sebesar 2,38 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penduduk dalam kelompok umur produktif (15—64 tahun) berjumlah 108.481 jiwa, atau meningkat sebesar 2,48 persen dari tahun 2013. Sedangkan jumlah penduduk umur tua (65 tahun

ke atas) pada tahun 2014 adalah sebesar 1.985 jiwa, atau bertambah 2,37 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.2. Struktur Umur Penduduk dan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) Kota Bontang Tahun 2010—2014

Tahun	Umur			RBK
	0—14 tahun	15—64 tahun	65+ tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	44,528	98,213	1,792	47.16
2011	45,714	100,851	1,846	47.16
2012	46,842	103,355	1,892	47.15
2013	48,005	105,936	1,939	47.15
2014	49,148	108,481	1,985	47.14

Sumber : BPS Kota Bontang

Dengan melihat komposisi penduduk berdasarkan umur, maka dapat dihitung rasio ketergantungan (*dependency ratio*), yaitu rasio yang menyatakan besarnya tanggungan penduduk kelompok umur produktif. Angka beban ketergantungan sangat penting dalam studi ekonomi, karena menunjukkan jumlah penduduk yang secara ekonomi tidak aktif per seratus penduduk yang aktif secara ekonomi. Rasio ketergantungan pada tahun 2014 adalah sebesar 47,13 yang artinya bahwa pada tahun 2014 secara rata-rata setiap 100 orang penduduk yang berusia produktif memiliki beban tanggungan sebanyak 47 sampai 48

orang penduduk yang bukan usia produktif. Apabila dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya, terjadi penurunan angka rasio ketergantungan yang menunjukkan bahwa penambahan penduduk pada kelompok umur produktif lebih cepat dari pada penambahan penduduk kelompok umur tidak/belum produktif.

3.2.2 GAMBARAN PENDIDIKAN

1. Prasarana Pendidikan

Salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan, yang mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, makin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan kualitas pendidikan dapat pula berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam pengertian sehari-hari, pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan.

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan

pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep '*link and match*', yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan jaman. Sedangkan yang dimaksudkan dengan efisiensi pengelolaan pendidikan adalah bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pemerintah menyadari bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Rendahnya pendapatan keluarga seringkali menjadi alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya. Realita ini senantiasa ditemui di sekeliling kita. Banyak anak yang seharusnya belajar, namun terpaksa bekerja untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Kondisi ini mendorong pemerintah membuat kebijakan wajib belajar pendidikan dasar enam tahun disusul dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun dan

bahkan berkomitmen terhadap pendidikan 12 tahun yang dilaksanakan secara gratis. Program ini telah berjalan efektif di Kota Bontang sejak tahun 2004 hingga saat ini, melalui pembiayaan APBD setiap tahun.

Pada tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah menunjukkan keseriusan dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan mewajibkan pendidikan 12 tahun dan mengalokasikan dana APBD untuk pendidikan SMU/SMK.

Program dan kebijakan pemerintah dewasa ini dalam bidang pendidikan pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang berbudi luhur, maju, adil dan sejahtera. Bertujuan untuk menampung jumlah murid sebanyak-banyaknya dan berbagai program pendidikan subsidi secara merata ke seluruh sekolah dengan perhitungan yang sama. Penekanan program adalah pada aspek kuantitas dan kualitas. Hal ini sangat dimaklumi karena pemerintah menginginkan agar penduduk terbebas dari masalah buta huruf, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar dan menengah. Upaya pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah dapat terlihat pada Tabel 3.3 di bawah ini, yang menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah sekolah, bukan hanya pada tingkat sekolah dasar namun juga pada tingkat

sekolah menengah atas.

Tabel 3.3. Jumlah Sekolah di Kota Bontang, Tahun 2010—2014

Tahun	SD	SLTP	SMU/SMK /MA
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	55	34	20
2011	56	34	21
2012	59	34	22
2013	60	33	25
2014	60	33	25

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang

2. Rasio Murid-Guru

Indikator lain yang cukup berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia adalah rasio murid-guru, yaitu rasio yang menggambarkan ketersediaan jumlah guru atau beban kerja seorang guru dalam menangani anak didiknya. Makin rendah nilai rasio, makin banyak perhatian yang dapat dicurahkan oleh seorang guru terhadap muridnya. Sehingga diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih lancar.

Di samping itu, rasio murid-guru dapat pula digunakan untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas. makin tinggi nilai rasio dapat berarti makin

rendah tingkat pengawasan/perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran pun makin rendah. Namun demikian, rasio yang terlalu rendah merupakan indikasi bahwa telah terjadi inefisiensi karena kelebihan jumlah guru. Oleh sebab itu, beban mengajar seorang guru hendaknya mendekati batas kemampuan ideal. Menurut hasil beberapa penelitian, rasio murid-guru yang ideal agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif adalah 20, yaitu seorang guru menangani sekitar 20 orang murid untuk setiap kelas.

Tabel 3.4. Rasio Murid–Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011—2014

Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
SD	18,83	21,27	18,68	17,69
SLTP	12,71	14,54	15,28	13,86
SLTA	10,54	12,17	12,10	9,91

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 rasio murid-guru masih memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu rasio terbesar adalah pada tingkat sekolah dasar, dan makin menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, namun secara proporsi pada tahun 2014 rasio jumlah

murid terhadap guru menurun, artinya seorang guru menangani jumlah murid yang lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Pada tingkat SD, sekitar 17—18 orang murid ditangani oleh seorang guru. Pada tingkat SLTP, sekitar 15—16 orang murid ditangani oleh seorang guru. Sementara itu pada tingkat pendidikan SLTA terjadi penurunan yang cukup signifikan yakni setiap 1 orang guru menangani sekitar 9—10 orang murid, berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana 1 orang guru menangani 12 hingga 13 murid.

Secara umum dalam empat tahun terakhir, terlihat bahwa rasio murid-guru di Kota Bontang masih berada pada kondisi ideal. Kecukupan jumlah guru pada tingkat sekolah dasar dan menengah tersebut tentu saja menjadi suatu nilai tambah yang positif bagi pembangunan bidang pendidikan di Kota Bontang. Dalam hal ini, pencapaian Kota Bontang sudah berada di atas pencapaian nasional yang angka rasio murid sekolah dasar dan menengahnya masih berkisar antara 25—30 murid per guru (Dirjen Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan – Fasli Jalal).

3. Tingkat Pendidikan Penduduk

Selain ketersediaan guru yang mencukupi, indikator lain yang dapat dilihat untuk mengukur

pencapaian pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan oleh penduduk. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, apabila dilihat menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan, terlihat bahwa struktur penduduk berusia 10 tahun ke atas di Kota Bontang tidak mengalami perubahan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 3.5. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Kota Bontang Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2009—2014

Tahun	SD Kebawah	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat Universitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	39,62	18,95	33,24	8,16
2010	31,78	19,89	38,55	9,77
2011	32,95	17,88	38,66	10,51
2012	33,57	19,30	37,75	9,38
2013	30,93	19,76	36,61	12,70
2014	32,72	18,11	38,40	10,77

Sumber : BPS Kota Bontang

Jumlah penduduk yang sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang SLTA masih merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai 38,40 persen dari seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas. Angka ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun (setingkat SLTP) berjumlah sekitar 18,11 persen, atau sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang berada pada level 19,76 persen. Sedangkan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang sudah menamatkan jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) pada tahun 2014 adalah sebesar 32,72 persen. Kemudian jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi adalah sebesar 10,77. Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Bontang mengenai pentingnya pendidikan diharapkan akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdidik bagi Kota Bontang guna peningkatan pembangunan daerah.

4. Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah penduduk pada suatu wilayah, terdapat beberapa

indikator yang dapat digunakan, antara lain yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah persentase jumlah seluruh siswa pada setiap jenjang pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk usia pendidikan yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan. Misalnya, APK pada tingkat SD merupakan perbandingan jumlah murid di tingkat SD dengan jumlah penduduk yang berusia antara 7—12 tahun. Sedangkan APM adalah persentase jumlah seluruh siswa usia pada suatu jenjang pendidikan tertentu dan berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama. Misalnya, nilai APM tingkat SLTP adalah perbandingan antara jumlah siswa SLTP yang berusia 13—15 tahun dengan jumlah penduduk yang berusia 13—15 tahun.

Tabel 3.6. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD, SLTP, dan SMU/SMK Kota Bontang, Tahun 2014

Jenjang Pendidikan	APK	APM
(1)	(2)	(3)
SD	105,14	94,59
SLTP	93,93	79,48
SMU/SMK	102,88	82,09

Sumber : BPS Kota Bontang

Pada tingkat pendidikan sekolah dasar sampai dengan SLTA, nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bontang cukup tinggi yaitu mendekati 100 persen, seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 11 di atas. Hal tersebut mengandung makna bahwa ketersediaan sekolah di Kota Bontang mampu menampung jumlah siswa sesuai dengan target.

Pada indikator APK, kesesuaian usia siswa dengan jenjang pendidikan tidak terlihat secara jelas, karena bisa jadi ada siswa yang terlalu cepat atau justru terlambat memasuki dunia sekolah. Hal tersebut dapat diatasi dengan menyandingkan nilai APK dengan Angka Partisipasi Murni (APM). Pada jenjang pendidikan SD, nilai APM Kota Bontang adalah sekitar 94,59 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa ada siswa di tingkat SD yang berusia bukan pada rentang 7—12 tahun, yakni sekitar 5,01 persen yang kemungkinan lebih muda dari 7 tahun atau lebih tua dari 12 tahun. Begitu pula pada tingkat pendidikan SLTP dan SLTA, nilai APM Kota Bontang masing-masing adalah 79,48 persen dan 82,09 persen. Nilai APM Kota Bontang yang belum mencapai 100 persen menunjukkan masih terdapat penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan namun tidak sesuai pada jenjang pendidikannya.

3.2.3 GAMBARAN KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Kesehatan dapat pula dijadikan sebagai barometer kesejahteraan seseorang. Dengan alasan tersebut, maka kesehatan dijadikan salah satu indikator pembangunan manusia. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat, terlaksananya pelayanan kesehatan yang bersifat merata, terpadu dan menyeluruh ke semua lapisan masyarakat baik dilihat dari akses untuk memperoleh layanan kesehatan maupun kemampuan ekonomi masyarakat untuk belanja kesehatan. Tujuan akhir dari pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Mengingat pentingnya faktor kesehatan, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Upaya tersebut telah membuahkan hasil yaitu dengan tidak terputusnya Kota Bontang meraih Piala Adipura sejak tahun 2008 sampai tahun 2014. Bahkan pada tahun 2013, Kota Bontang mampu meraih Piala Adipura Kencana, yaitu sebuah

anugerah tertinggi untuk kota terbersih di Indonesia dari Presiden RI. Selain itu penghargaan WTN bidang Ketertiban Lalu Lintas dan penghargaan sebagai Kota Sehat untuk kategori Swasti Saba Wistara Emas dari Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri pun telah diraih oleh Kota Bontang.

Di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Bontang terus berupaya mewujudkan masyarakat sadar kesehatan melalui pemberian penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat, pemberian ASKES GAKIN, jaminan kesehatan daerah (jamkesda) gratis, Jamkesprov, serta melakukan perbaikan dan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan masyarakat termasuk klinik khusus pegawai pemerintah yang disebut dengan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP), serta RSUD Kota Bontang.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah di bidang kesehatan, selain penghargaan-penghargaan di atas, dapat pula dilihat melalui beberapa indikator yang dapat mengukur pencapaian pembangunan kesehatan antara lain usia harapan hidup (AHH). Pada tahun 2014, angka harapan hidup penduduk Kota Bontang mencapai 73,68 tahun, naik sekitar 0,01 apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 73,67 tahun. Angka harapan

hidup bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri, namun dipengaruhi oleh beberapa variabel lain di antaranya angka kesakitan, lamanya sakit, serta rasio ketersediaan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2014, prasarana kesehatan yang dimiliki oleh Kota Bontang meliputi 5 unit Rumah Sakit, 6 unit Puskesmas, 2 unit Puskesmas Pembantu, 5 unit Balai Kesehatan, dan 113 Posyandu.

Derajat kesehatan masyarakat suatu daerah juga dapat diukur menggunakan indikator Angka Kematian Bayi (AKB). Indikator ini dapat menunjukkan dimensi sosial dan kesehatan masyarakat dengan bertitik tolak pada pandangan bahwa penduduk yang rentan pada perubahan sosial ekonomi dan kualitas lingkungan adalah mereka yang berumur kurang dari satu tahun. Seperti diketahui bahwa AKB sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi orang tua atau orang yang mengasuh, terutama kesehatan dan gizi perempuan khususnya pada masa kehamilan, melahirkan dan masa menyusui, sehingga makin baik kondisi sosial ekonomi orang tua makin besar peluang seorang bayi memperoleh kualitas hidup yang lebih baik serta berumur panjang. Besarnya AKB dapat mencerminkan tingkat kepedulian terhadap kesehatan perempuan. Pada dasarnya penghitungan AKB dapat diperoleh dengan menggunakan jumlah Anak Lahir Hidup (ALH)

dan Anak Masih Hidup (AMH) melalui program *mortpak*.

Definisi Anak lahir hidup (ALH) adalah banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya sedangkan anak masih hidup (AMH) adalah jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki oleh seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan. Perbedaan antara ALH dan AMH merupakan jumlah anak yang meninggal. Angka ini merupakan bahan perhitungan angka harapan hidup di suatu wilayah. Tabel 12 di bawah ini menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah menikah dan rata-rata jumlah anak yang masih hidup pada saat pencacahan dilaksanakan. Terlihat bahwa rata-rata jumlah anak lahir hidup yang dimiliki oleh seorang wanita yang pernah menikah di Kota Bontang adalah sekitar 2—3 orang anak. Sedangkan rata-rata anak yang masih hidup juga berkisar antara 2—3 orang, atau dengan kata lain tingkat kematian anak di Kota Bontang bisa dikatakan cukup rendah.

Tabel 3.7. Rata-rata Jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) yang Dimiliki oleh Setiap Penduduk Wanita Kota Bontang yang Pernah Menikah, Tahun 2010—2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ALH	2,40	2,45	2,60	2,36	2,49
AMH	2,35	2,37	2,44	2,27	2,36

Sumber : BPS Kota Bontang

Indikator kesehatan lainnya pada pembangunan manusia yang dapat dijadikan sebagai alat ukur adalah angka kesakitan. Angka kesakitan merupakan salah satu Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, yang merupakan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan terhadap seluruh penduduk. Persentase penduduk Kota Bontang yang mengalami keluhan gangguan kesehatan pada tahun 2014 adalah sebesar 27,32 persen, atau meningkat apabila dibandingkan dengan angka kesakitan tahun 2013 yang sebesar 23,42 persen. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, terlihat bahwa persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan selalu lebih tinggi dari pada persentase penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan. Hal

tersebut wajar mengingat bahwa perempuan memiliki resiko karena adanya proses menstruasi dan kehamilan.

Upaya Pemerintah Kota Bontang dalam memberikan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup sehat. Salah satu upaya dari pemerintah Kota Bontang di bidang kesehatan yang terus ditingkatkan adalah dengan mendirikan Puskesmas Keluarga yang buka 24 jam yang menggabungkan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan Upaya Kesehatan Personal (UKP) sejak 1 Januari 2012, agar masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah, tidak terhalang oleh jarak dan waktu.

Tabel 3.8. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan, Tahun 2013—2014

Ada/tidak keluhan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2013			
1. Ada keluhan	22,44	24,50	23,42
2. Tidak ada	77,56	75,50	76,58
Total	100,00	100,00	100,00
2014			
3. Ada keluhan	26,69	28,02	27,32
4. Tidak ada	73,31	71,98	72,67
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Bontang

3.2.4 GAMBARAN KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Salah satu sasaran pembangunan adalah perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang serta memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Angkatan kerja atau lebih dikenal dengan istilah tenaga kerja berdiri pada dua posisi penting dalam pembangunan, yaitu sebagai

subjek sekaligus objek. Karena itu peningkatan dalam jumlah angkatan kerja bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan permasalahan berupa pengangguran.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, khususnya penduduk yang tergolong usia kerja, sebagian dari mereka diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam perekonomian. Selain menggambarkan daya serap perekonomian terhadap pertumbuhan tenaga kerja, indikator tenaga kerja juga dapat menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja menurut sektor dan wilayah.

Tabel 3.9 di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk kota Bontang yang berusia 15 tahun ke atas selama kurun enam tahun terakhir. Penduduk usia kerja terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang terlibat atau sedang berusaha terlibat di dalam aktivitas ekonomi produktif. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang tidak terlibat secara aktif dalam aktivitas ekonomi, misalnya anak sekolah, ibu rumah

tangga, orang-orang tua, dan orang-orang sakit yang sudah tidak mampu lagi bekerja.

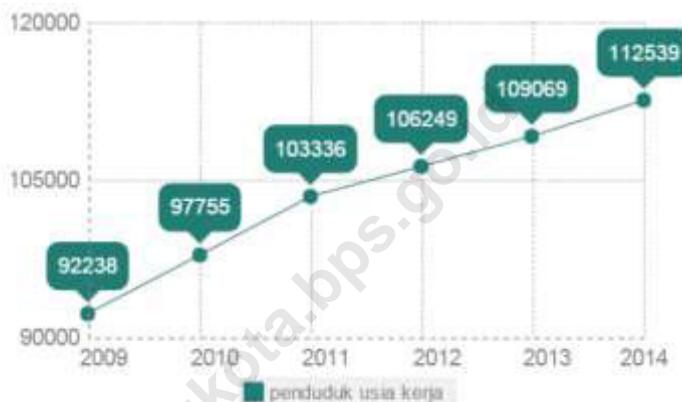
Tabel 3.9. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Kota Bontang Tahun 2009—2014

Tahun	Jumlah
(1)	(2)
2009	92.238
2010	97.755
2011	100.193
2012	104.285
2013	109.326
2014	112.539

Sumber : BPS Kota Bontang

Sejalan dengan penambahan jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014 tercatat jumlah angkatan kerja di Kota Bontang sebanyak 112.539 orang, atau meningkat sekitar 2,93 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pola peningkatan angkatan kerja selama enam tahun terakhir digambarkan secara lebih jelas oleh Grafik 2 di bawah ini.

Grafik 2. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Kota Bontang Tahun 2009—2014



Keterlibatan penduduk di dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan membandingkan antara banyaknya penduduk yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja, baik sudah bekerja maupun sedang mencari kerja/menyiapkan usaha baru, dengan jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas). Perbandingan tersebut dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Makin tinggi nilai TPAK makin banyak proporsi penduduk usia kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja. Selain nilai TPAK, ukuran lain yang sering digunakan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator TPT

didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang sedang berusaha mencari pekerjaan secara aktif dengan jumlah angkatan kerja. Lawan TPT adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Kesempatan kerja memberi gambaran mengenai tingkat penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Pertambahan dan pengurangan penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dipengaruhi oleh dinamika struktur umur penduduk, jenis kelamin, struktur ekonomi, dan migrasi.

Tabel 3.10. Indikator Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2012—2014

Uraian	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan kerja	77.557	71.838	75.621
Bekerja	66.399	63.899	68.526
Mencari kerja	11.158	7.939	7.095
TPAK (%)	73,00	65,86	67,20
TPT (%)	14,16	14,32	9,38

Sumber : BPS Kota Bontang

Semakin besar nilai TPT maka makin besar pengurangan kesempatan kerja dan begitu sebaliknya. Perkembangan nilai TPAK dan TPT Kota Bontang diperlihatkan oleh Tabel 3.10 di atas. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bontang pada tahun 2014 tercatat sebesar 67,20 persen. Nilai ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 65,86 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya jumlah penduduk sebagai angkatan kerja baik yang bekerja maupun yang menganggur terhadap penduduk usia kerja di Kota Bontang.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bontang pada tahun 2014 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari sekitar 14,32 persen di tahun 2013 menjadi sebesar 9,38 persen pada tahun 2014. Angka tersebut mengandung makna bahwa untuk setiap 100 orang penduduk Kota Bontang yang tergolong ke dalam angkatan kerja, terdapat 9—10 orang yang sedang mencari kerja (pengangguran).

Persoalan pengangguran terjadi karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada, namun hal itu tidak selalu berlaku mutlak. Persoalan pengangguran

dapat pula terjadi karena lapangan pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, tingkat pendidikan, bahkan jenis kelamin tenaga kerja yang ada. Oleh sebab itu, selain penambahan lapangan kerja, kesesuaian antara jenis lapangan pekerjaan dengan keterampilan dan jenis kelamin tenaga kerja pun menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator kebijakan adalah dengan tetap melanjutkan pendidikan gratis, sehingga diharapkan dengan makin tingginya kualitas pendidikan masyarakat makin tinggi pula daya saing mereka di dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, dengan lebih banyak lagi mendirikan tempat-tempat pelatihan keterampilan menjadi salah satu cara mengatasi pengangguran. Walaupun tingkat pendidikan formal rendah, namun apabila keterampilan yang dimiliki mumpuni, seseorang masih dapat bekerja. Program lainnya yang dapat mengatasi pengangguran adalah penyediaan kredit yang mudah dan murah, sehingga diharapkan dapat merangsang para pelaku usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Selanjutnya, berdasarkan status pekerjaannya, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok yaitu berusaha

sendiri, berusaha dengan dibantu oleh buruh tidak tetap, berusaha dengan dibantu oleh buruh tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga), dan pekerja bebas. Perkembangan persentase masing-masing kelompok tenaga kerja adalah seperti pada Tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3.11. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Kota Bontang Tahun 2012—2014

Status Pekerjaan	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	12,79	20,46	12,41
Usaha dengan buruh tidak tetap	7,84	8,31	11,25
Usaha dengan buruh tetap	4,43	4,15	5,01
Buruh/Karyawan/Pegawai	58,93	56,78	63,1
Pekerja tidak dibayar	14,78	9,38	5,36
Pekerja Bebas	1,23	0,93	2,78
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Bontang

Dalam periode tiga tahun terakhir, struktur penduduk bekerja di Kota Bontang didominasi oleh pekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pada tahun 2014 tercatat sekitar 63,1 persen pekerja di Kota Bontang yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Mereka umumnya bekerja di sektor industri pengolahan, pertambangan, dan jasa. Kemudian penduduk dengan status pekerjaan Berusaha sendiri dan Usaha dengan buruh tidak tetap dengan persentase masing-masing sebesar 12,41 persen dan 11,25 persen. Dengan melihat pola selama 3 tahun terakhir, maka tampak bahwa proporsi penduduk dengan status pekerjaan Usaha dengan buruh tidak tetap terus mengalami peningkatan, sebaliknya penduduk yang merupakan Pekerja tidak dibayar terus mengalami penurunan dari 14,78 persen di tahun 2012 hingga menjadi 5,36 persen di tahun 2014. Di tahun 2014 status pekerjaan Pekerja bebas masih merupakan status pekerjaan dengan persentase terkecil yakni sebesar 2,78 persen.

3.2.5 GAMBARAN PEREKONOMIAN

1. PDRB Kota Bontang

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu ekonomi Negara atau daerah dalam suatu periode tertentu. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sudah melakukan perubahan tahun dasar baru (Tahun 2010) berdasarkan rekomendasi PBB tentang penggantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun sekali. Mengingat PBDR tahun dasar 2010 sudah berbasis SNA/*System of National Accounts* dapat dibandingkan secara internasional, mampu menjaga konsistensi dan memperkecil perbedaan antara Kota Bontang dengan PDRB Regional (Provinsi dalam suatu wilayah).

PDRB juga merupakan indikator kinerja suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi yang dimiliki secara komersial untuk menghasilkan nilai tambah. Oleh sebab itu, besaran nilai PDRB suatu daerah sangat bergantung pada kemampuan faktor produksi dan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Salah satu indikator yang diturunkan dari PDRB adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perubahan jumlah produksi barang dan jasa pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat bergantung pada jenis lapangan usaha yang beraktivitas di wilayah tersebut. Sebagai kota yang merupakan

tempat beroperasinya dua perusahaan besar, yaitu PT. BADAQ NGL dan PT. Pupuk Kaltim, maka perekonomian Kota Bontang sangat didominasi oleh kedua perusahaan itu. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan pertumbuhan ekonomi Kota Bontang selama lima tahun terakhir, baik dengan migas maupun tanpa migas, disajikan oleh Tabel 17 berikut ini.

Tabel 3.12. Perkembangan dan Laju Pertumbuhan PDRB Migas dan Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2010—2014

Tahun	Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	54.258.700	12.587.203	-	-
2011	55.625.376	14.542.329	-7,42	4,85
2012	54.511.513	17.760.358	-9,18	15,62
2013*	56.278.044	20.800.675	-5,72	8,64
2014**	58.775.497	21.006.716	-3,41	3,71

**)= Angka sangat sementara;

*)= Angka Sementara

Sumber: BPS Kota Bontang

Selama lima tahun terakhir, nilai PDRB Kota Bontang atas harga berlaku terus mengalami kenaikan

yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2010 tercatat nilai 54,26 triliun terus meningkat hingga pada tahun 2014 menjadi sebesar 58,77 triliun rupiah. Hal tersebut selain dipengaruhi oleh perubahan jumlah produksi barang dan jasa, juga dipengaruhi oleh perubahan harga-harga komoditas. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 58,77 triliun rupiah pada tahun 2014, atau naik sekitar 4,44 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 56,28 triliun. Nilai PDRB Kota Bontang telah memberikan sumbangan sekitar 10,15 persen terhadap nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014. Nilai yang cukup besar ini utamanya disumbang oleh nilai tambah subsektor gas alam cair (LNG) yang merupakan produk utama PT. BADAQ NGL, dan sektor industri pengolahan yaitu komoditas pupuk yang merupakan produk utama PT. Pupuk Kaltim.

Untuk kepentingan analisis, PDRB dapat disajikan dengan migas dan tanpa migas. PDRB tanpa migas dihasilkan dengan cara mengeluarkan komponen minyak dan gas alam pada pertambangan dan industri pengolahan dari penghitungan PDRB. Hal tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan perekonomian suatu wilayah di luar sektor migas. Aktivitas ekonomi Kota Bontang tercatat menghasilkan nilai tambah tanpa migas sebesar 21,01 triliun rupiah sepanjang tahun

2014, atau naik sekitar 0,99 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2013. Perbedaan yang cukup besar antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas dan tanpa migas menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bontang sangat ditopang oleh sektor migas terutama gas alam cair (LNG). Apabila dilihat peranan Kota Bontang dalam pembentukan PDRB tanpa migas di Provinsi Kalimantan Timur, tercatat PDRB tanpa migas Kota Bontang menyumbang sekitar 4,78 persen, atau jauh lebih rendah dari perannya dalam pembentukan PDRB dengan migas di Kalimantan Timur. Namun demikian, nilai tambah sektor-sektor non migas Kota Bontang selalu menunjukkan kecenderungan tumbuh positif setiap tahunnya.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, karena nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas. Hal tersebut terlihat pada pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang, selalu negatif selama lima tahun terakhir meskipun nilai PDRB atas dasar harga berlakunya selalu meningkat. Pola pertumbuhan ekonomi Kota Bontang baik dengan migas maupun tanpa migas selama periode 2011—2014 ditunjukkan oleh Grafik 3 di

bawah ini.

Grafik 3. Laju Pertumbuhan PDRB Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2011—2014 (persen)



Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah pada suatu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah produksi barang dan jasa pada periode sebelumnya. Pertumbuhan positif bermakna terjadi kenaikan jumlah produksi barang dan jasa, sebaliknya pertumbuhan negatif menandakan terjadi penurunan produksi barang dan jasa.

Jika dilihat pertumbuhan PDRB Kota Bontang dengan migas (riil), terlihat bahwa selama lima tahun terakhir terjadi kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang negatif. Secara berturut-turut, pertumbuhan yang terus melambat tersebut yaitu sekitar -7,42 persen

(2011), menjadi -9,18 persen (2012), melambat menjadi -5,72 persen pada tahun 2013 dan pertumbuhan terjadi pada tahun 2014 yang mencapai -3,41 persen. Hal tersebut terutama disebabkan oleh makin menurunnya produksi gas alam cair oleh PT. BADAQ. Apabila pengaruh sektor migas tersebut dikeluarkan dari nilai PDRB, maka terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa migas Kota Bontang selalu positif (meningkat). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 4,85 persen kemudian sangat signifikan menjadi sebesar 15,62 persen pada tahun 2012. Berikutnya pertumbuhan ekonomi tanpa migas sedikit menurun dan cenderung masing-masing 8,64 persen (2013) dan pada tahun 2014 mampu tumbuh searah kelambatan atas dasar harga berlaku 3,71 persen.

Indikator lain yang dapat diturunkan dari besaran PDRB adalah struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi menunjukkan peranan nilai tambah bruto masing-masing sektor ekonomi terhadap nilai PDRB. Peranan tersebut juga akan berimplikasi pada besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, perekonomian Kota Bontang sangat ditopang oleh aktivitas dua perusahaan besar yang ada di kota ini, yaitu PT. BADAQ dan PT.

Pupuk Kaltim. Hal tersebut terlihat pada sumbangan sektor Industri Pengolahan yang mencapai 85,7 persen terhadap PDRB Kota Bontang tahun 2014. Sumbangan terbesar berikutnya diberikan oleh sektor Konstruksi (Bangunan) yaitu sekitar 4,1 persen, diikuti oleh sektor Perdagangan besar, eceran yang mampu berkontribusi sekitar 2,17 persen terhadap keseluruhan nilai tambah bruto yang tercipta di Kota Bontang. Sedangkan sektor-sektor lainnya hanya mampu berkontribusi sekitar 1 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Bontang tahun 2014.

Tabel 3.13. Struktur Perekonomian Kota Bontang Dengan Migas Tahun 2014

	Kategori/Industry	2014**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.77
2	Pertambangan dan Penggalian	1.68
3	Industri Pengolahan	85.70
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01
6	Konstruksi	4.10
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.17
8	Transportasi dan Pergudangan	1.00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.35
10	Informasi dan Komunikasi	0.59
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.66
12	Real Estat	0.34
13	Jasa Perusahaan	0.36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.99
15	Jasa Pendidikan	0.63
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.44
17	Jasa lainnya	0.20
	PDRB	100.00

**Angka sangat sementara

Seperti halnya pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi juga dapat dilihat dengan migas dan tanpa migas. Tabel 19 di bawah ini menyajikan distribusi persentase PDRB tanpa migas Kota Bontang yang merupakan struktur ekonomi tanpa migas.

Tabel 3.14. Distribusi Persentase PDRB Tanpa Migas Kota Bontang Tahun 2013

Lapangan Usaha/Industry		2014**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.15
2	Pertambangan dan Penggalian	-
3	Industri Pengolahan	64.68
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04
6	Konstruksi	11.46
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.08
8	Transportasi dan Pergudangan	2.80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.97
10	Informasi dan Komunikasi	1.66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.86
12	Real Estat	0.95
13	Jasa Perusahaan	1.01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.78
15	Jasa Pendidikan	1.76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.22
17	Jasa lainnya	0.56
Produk Domestik Regional Bruto		100.00

**Angka sangat sementara

Pada Tabel 3.14 tersebut terlihat bahwa perekonomian Kota Bontang tanpa migas tetap didominasi oleh sektor Industri Pengolahan yang menyumbang sekitar 64,68 persen. Peranan terbesar berikutnya tetap dipegang oleh sektor Konstruksi yang

mampu menyumbang 11,46 persen terhadap PDRB Kota Bontang, yang diikuti oleh sumbangan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sekitar 6,08 persen. Sisanya sebesar 17,79 persen merupakan sumbangan dari sektor-sektor lain yang masing-masing kontribusinya masih berada di bawah 3 persen terhadap PDRB Kota Bontang tahun 2014.

Indikator berikutnya yang dapat diturunkan dari nilai PDRB adalah PDRB per kapita dan pendapatan per kapita. PDRB per kapita yang diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada kondisi pertengahan tahun. Sedang pendapatan per kapita diperoleh dari Nilai PDRB yang telah dikurangi faktor penyusutan dan pajak tak langsung neto kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pada kondisi pertengahan tahun.

Perkembangan PDRB per kapita dengan migas dan pendapatan per kapita dengan migas Kota Bontang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi produksi subsektor Industri Migas, dan kenaikan harga migas terhadap nilai tukar mata uang Dollar Amerika di pasaran internasional. Sebagaimana diketahui, subsektor Industri Gas Alam Cair (LNG) sangat berpengaruh terhadap pembentukan

PDRB Kota Bontang. PDRB per Kapita dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang Tahun 2010-2014 dapat di lihat pada gambar berikut ini :

Tabel 3.15. Perkembangan PDRB Per Kapita Dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang Tahun 2010 – 2014 (Ribu Rupiah)

Pendapatan Per Kapita	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dengan Migas	375.407	374.806	358.419	361.034	368.235
Tanpa Migas	87.089	97.987	116.776	133.440	131.609

Sumber : BPS Kota Bontang

PDRB per kapita dengan migas Kota Bontang tahun 2014 tercatat sebesar 368,24 juta rupiah, atau naik sebesar 1,99 persen dibandingkan dengan PDRB per kapita tahun 2013 yang mencapai 361,03 juta rupiah. Selanjutnya PDRB per kapita Kota Bontang pada tahun 2012 tercatat lebih rendah yaitu sebesar 358,42 juta rupiah dan lebih rendah disbanding tahun 2011 mencapai 374,81 juta rupiah serta PDRB per Kapita tertinggi dicapai pada tahun 2010 sebesar 375,41 juta rupiah.

Sedangkan PDRB per kapita tanpa migas Kota Bontang terlihat selalu meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, PDRB per kapita adalah sebesar 131,61 juta rupiah dan lebih kecil bila dibandingkan dengan PDRB per Kapita 2013 sebesar 133,44 juta rupiah. Nilai tersebut yang paling tinggi selama lima tahun terakhir. Sementara PDRB per Kapita tahun 2010-2012 terus meningkat berturut-turut mulai 87,09 juta rupiah, menjadi 97,99 juta rupiah dan 116,78 juta rupiah.

BAB 4

STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA

Manusia merupakan unsur utama dari seluruh kepentingan pembangunan yang menempatkan posisinya pada dua peran yaitu sebagai subyek dan sekaligus juga sebagai obyek pembangunan. Oleh karenanya tuntutan ke arah terciptanya manusia yang berkualitas melalui pendidikan sebagai modal pembangunan pun makin besar. Dengan dimasukkannya konsep pembangunan manusia ke dalam kebijakan pembangunan bukan berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan absolut dan mencegah kerusakan lingkungan. Perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk mencapai tujuan utama, yaitu memperluas pilihan bagi manusia.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan

semua isu dalam masyarakat baik itu tentang pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

4.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG

Dari hasil penghitungan indeks pembangunan manusia Kota Bontang tahun 2014 dapat diketahui secara umum terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam keberhasilan pembangunan manusianya. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, dan faktor yang dominan selama ini adalah dengan diterapkannya otonomi daerah, di mana daerah diberi kewenangan yang luas dalam membangun daerahnya. sehingga tiap daerah dapat menentukan prioritas mana yang harus dibangun terlebih dahulu. Kota Bontang sebagai kota pemekaran juga menerapkan sistem prioritas tersebut. Dari sekian kegiatan pembangunan di Kota Bontang, prioritas masih dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.

Pembangunan infrastruktur dalam peranannya terhadap pembangunan manusia adalah secara tidak langsung sebagai pemacu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang paling terlihat jelas adalah terbangunnya sarana jalan yang membuka akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dengan terbukanya akses ini pemerintah mengharapkan masyarakat dapat secara aktif menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Jika diukur menggunakan jarak yang ditempuh menuju nilai ideal, maka reduksi shortfall selama kurun waktu 2013—2014 adalah sebesar angka 1,10 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka IPM Kota Bontang terus mengalami kemajuan yang cukup baik, segala upaya pemerintah dalam membangun kualitas manusia di Kota Bontang sudah menunjukkan hasil. Kemudian untuk peringkat antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang merupakan Kota dengan peringkat pertama atau yang tertinggi di Kalimantan Timur, sementara posisi kedua dan ketiga diduduki oleh kota Samarinda dan Balikpapan.

Berdasarkan kajian analisis IPM Kota Bontang, jika dilihat dari komponen-komponennya maka yang

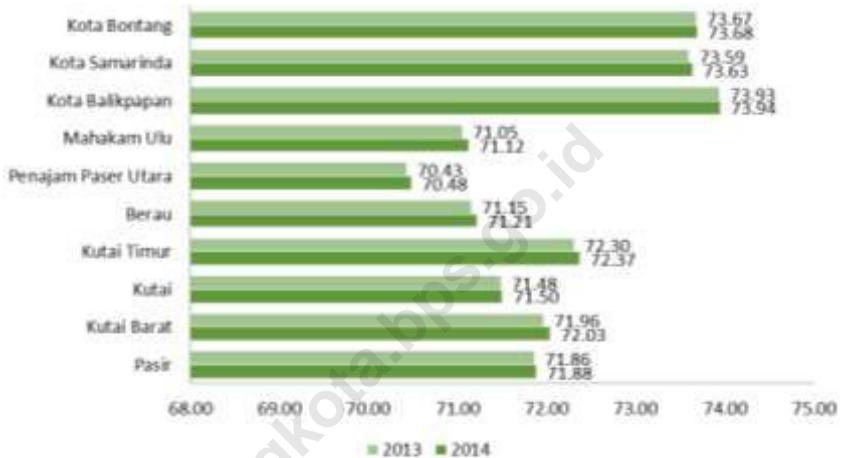
menguatkan nilai IPM Kota Bontang adalah komponen Pengeluaran rill yang disesuaikan merupakan yang paling tinggi di Provinsi Kalimantan Timur, kemudian untuk komponen Rata-rata lama sekolah, Kota Bontang adalah yang tertinggi kedua setelah Kota Balikpapan. Sedangkan komponen Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs), masih tertinggal dari beberapa kota di Kalimantan Timur lainnya.

4.1.1 ANGKA HARAPAN HIDUP

Indikator ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu mempresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai angka harapan hidup (AHH) yang lebih tinggi.

Besarnya nilai AHH berkaitan erat dengan angka kematian bayi, yaitu makin tinggi angka kematian bayi maka makin menurun nilai AHH. Faktor yang mempengaruhi perubahan AHH dapat ditinjau dari berbagai hal seperti kondisi lingkungan hidup, status sosial ekonomi, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi dan lain-lain.

Grafik 6. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2013—2014 (tahun)



Grafik 6 di atas menunjukkan angka harapan hidup kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Terlihat bahwa angka harapan hidup Kota Bontang menempati urutan kedua tertinggi di bawah Kota Balikpapan. Angka harapan hidup Kota Bontang mengalami kenaikan sebesar 0,01 tahun dari sebesar 73,67 tahun pada tahun 2013 menjadi sebesar 73,68 tahun pada tahun 2014. Angka tersebut masih berada di atas angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 73,62 pada tahun 2014. Pembangunan yang dilakukan Kota Bontang dalam mewujudkan Bontang Sehat dengan memberikan fasilitas pengobatan gratis ikut mendorong kenaikan nilai komponen angka harapan hidup. Dengan demikian dapat

diasumsikan bahwa kualitas hidup penduduk Kota Bontang relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

Upaya penurunan mortalitas perlu dilakukan seiring dengan usaha pengendalian fertilitas, karena keberhasilan mengurangi laju pertumbuhan penduduk pada dasarnya akan mempercepat terjadinya peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian penanganan masalah demografi sepatutnya ditempatkan sebagai isu sentral dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi, baik untuk kesehatan, pendidikan, perumahan maupun perluasan kesempatan kerja. Hal itu diupayakan sebagai dasar untuk memperkuat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

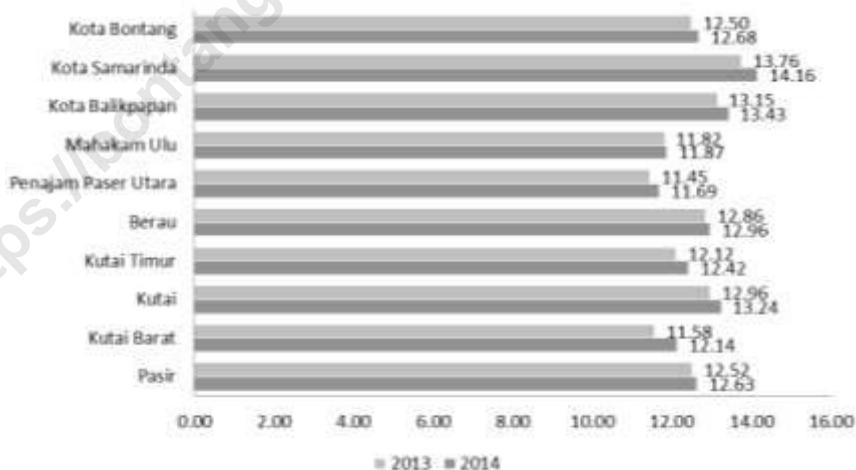
4.1.2 ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH(EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. AHLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi

pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2014 AHLS Kota Bontang mencapai 12,68 atau lebih tinggi 0,18 tahun dari tahun 2013 (12,50). Perbandingan AHLS kabupaten/kota di Kalimantan Timur diperlihatkan oleh Grafik 7 di bawah ini.

Grafik 7. Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2013-2014 (Tahun)



menempati urutan kelima teratas dalam angka Harapan Lama Sekolah. Karenanya masih perlu diupayakan lagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Bontang di bidang pendidikan, salah satu upaya

peningkatan SDM tersebut adalah dengan dicanangkan program Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar 12 tahun sejak tahun 2004. Landasan ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah serius dalam upaya meningkatkan kualitas SDM bidang pendidikan di Kota Bontang.

Di tingkat regional khususnya di Kota Bontang selain dengan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, untuk menambah tingkat kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan, pemerintah kota juga memberikan honor tambahan bagi tenaga pendidik dan administrasi di semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta, termasuk taman kanak-kanak. Selain memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah juga serius dalam menangani bidang pendidikan yaitu dengan dibebaskannya SPP dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas. Dan juga adanya pemberian beasiswa pendidikan, baik dari Pemerintah Kota maupun dari organisasi non pemerintah seperti PT.Badak LNG dan PT. Pupuk Kaltim kepada pegawai pemerintah daerah dan masyarakat Kota Bontang, sehingga memberikan dampak yang luas bagi percepatan peningkatan sumber daya manusia.

4.1.3 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Di samping Harapan Lama Sekolah, diperlukan suatu indikator lain yang dapat mewakili tingkat keterampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan. Makin lama seseorang mengenyam bangku sekolah diharapkan makin baik keterampilan yang dimiliki. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan hal itu adalah rata-rata lama sekolah. Ukuran tersebut memberikan sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk.

Pada tahun 2014 rata-rata lama bersekolah Kota Bontang mencapai angka 10,35 tahun, yang mengandung makna bahwa rata-rata penduduk Kota Bontang bersekolah hingga kelas sepuluh atau kelas dua Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Dengan kata lain penduduk Kota Bontang rata-rata mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA selama lebih dari 1 tahun. Perbandingan rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara disajikan oleh Grafik 8 di bawah ini.

Grafik 8. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2013-2014 (Tahun)



Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata-rata lama sekolah Kota Bontang mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun. Namun peningkatan itu belum mampu menyalip capaian Kota Balikpapan yang sekitar 10,41, sehingga Kota Bontang masih berada di posisi kedua. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bontang tahun pun masih jauh lebih tinggi dari pada capaian kabupaten/kota lain di tahun 2014. Tentu saja hal ini merupakan suatu

prestasi yang cukup menggembirakan dan menjadi suatu modal positif bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Bontang. Tidak dapat dipungkiri angka rata-rata lama sekolah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, karena tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang makin tinggi dan peranan aktif dari pemerintah untuk membuka akses yang makin luas terhadap sarana dan fasilitas pendidikan.

4.1.4 RATA-RATA PENGELUARAN RIIL

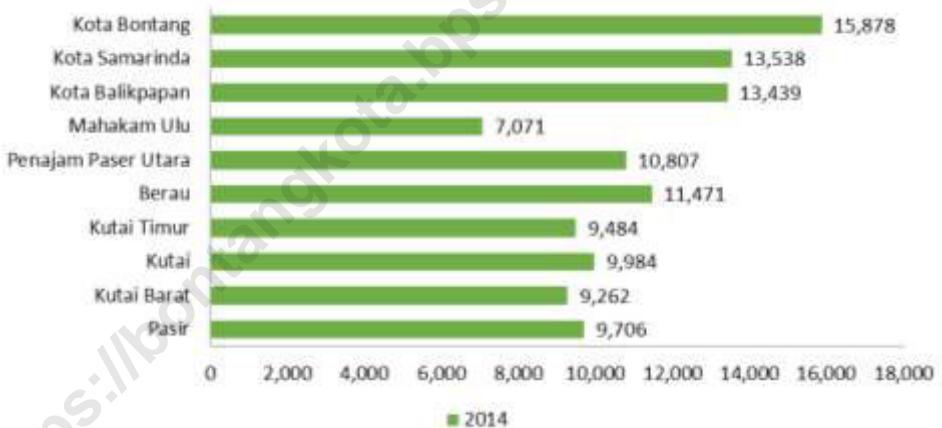
Rata-rata pengeluaran riil Perkapita merupakan indikator dengan perkembangan paling cepat apabila dibandingkan dengan indikator pembangunan manusia lainnya. Jika dibandingkan dengan sembilan kota lainnya di Kalimantan Timur, rata-rata pengeluaran riil per kapita Kota Bontang adalah yang tertinggi, seperti terlihat pada Grafik 9.

Ke depannya, langkah intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Mendekatkan pemukiman pada akses pasar (komoditas) yang berada di sekitarnya sehingga mudah dijangkau.

2. Memberikan tambahan keterampilan pemenuhan variasi asupan keluarga.
3. Meningkatkan pendapatan/kesejahteraan yang berimplikasi pada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

Grafik 9. Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita Kabupaten/Kota di Kalimantan, Tahun 2014 (000 Rupiah)



Rata-rata pengeluaran riil per kapita Kota Bontang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 tercatat rata-rata pengeluaran riil per kapita penduduk Kota Bontang adalah sebesar 15.820 rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 15.878 rupiah. Peningkatan pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, terutama kondisi perekonomian secara global, seperti peningkatan harga bahan kebutuhan

pokok baik bahan makanan maupun non bahan makanan, peningkatan jumlah penduduk, dan lain-lain. Selain itu peningkatan pengeluaran juga bisa disebabkan oleh peningkatan pendapatan penduduk, sehingga mereka tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya saja, tetapi sudah mulai memikirkan kebutuhan sekunder dan tersier.

Pendekatan melalui pengeluaran yang merefleksikan pendapatan merupakan ukuran kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan layak. Keterkaitan masalah pendapatan tentunya berhubungan dengan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan kemampuan daya beli masyarakat, variabel subkomponen pendapatan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Produktivitas, PDRB per kapita.
- b. Pendidikan, meliputi persentase penduduk tamat SLTA atau lebih tinggi.
- c. Lapangan pekerjaan, meliputi persentase angkatan kerja di sektor sekunder.
- d. Status pekerjaan.

Variabel di atas sangat dominan dalam mempengaruhi pendapatan yang pada tahap selanjutnya akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, variabel-variabel

di atas termasuk subvariabel yang eksis dalam mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat, sehingga sebaiknya mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh komponen pendapatan merupakan komponen yang sangat rawan dalam melahirkan ketimpangan distribusi pendapatan, kecemburuan sosial serta masalah pengangguran dan kemiskinan. Daya beli ini ditekankan pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan paket komoditas yang disesuaikan dengan kebutuhan di Jakarta Selatan (lihat tabel 2.1). Perkembangan masing-masing komponen pembentuk Indeks Pembangunan (IPM) Kota Bontang selama empat tahun terakhir disajikan oleh Tabel 4.1

Tabel 4.1. Indikator Pembangunan Manusia Kota Bontang, Tahun 2011—2014

Indikator	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Angka harapan hidup (tahun)	73,65	73,66	73,67	73,68
2. Angka harapan lama sekolah (tahun)	11,94	12,12	12,50	12,68
3. Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,22	10,28	10,34	10,35
4. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (rupiah)	15.271	15.318	15.820	15.878
IPM	77,25	77,55	78,34	78,58
Peringkat Provinsi	1	1	1	1
Peringkat Nasional	-	-	-	-
Reduksi Shortfall	1,19	1,32	3,53	1,10

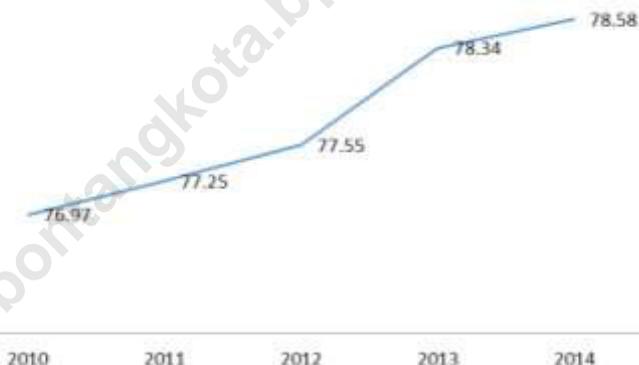
Sumber : BPS Kota Bontang

4.2 PERKEMBANGAN IPM KOTA BONTANG 5 TAHUN TERAKHIR

Sejalan dengan perkembangan masing-masing komponen pembentuknya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang selama lima tahun terakhir pun mengalami kecenderungan yang positif setiap tahunnya.

Di tahun 2011 tercatat IPM Kota Bontang sebesar 77,25 kemudian naik menjadi 77,55 pada tahun 2012, dan terus meningkat hingga 78,34 pada tahun 2013 dan 78,58 pada tahun 2014. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan manusia di Kota Bontang cukup berhasil. Pola perkembangan IPM Kota Bontang secara lebih jelas diperlihatkan oleh Grafik 10 di bawah ini.

Grafik 10. Perkembangan IPM Kota Bontang, Tahun 2010—2014 (tahun)



4.3 KECEPATAN MENCAPAI ANGKA IPM IDEAL (REDUKSI *SHORTFALL*)

Nilai ideal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu wilayah adalah 100 persen. Sehingga segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IPM pada hakikatnya adalah untuk mendekati angka ideal tersebut. Kecepatan perkembangan nilai IPM menuju nilai ideal dapat diukur dengan suatu indikator yang disebut reduksi *shortfall*. Tabel 4.2 di bawah ini

menyajikan perbandingan reduksi *shortfall* IPM kabupaten/kota di Kalimantan Timur pada tahun 2014.

Tabel 4.2. Perbandingan Reduksi *Shortfall* IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013-2014

Kabupaten/Kota	IPM		Reduksi Shortfall
	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pasir	69,61	69,87	0,84
Kutai Barat	68,13	68,91	2,46
Kutai Kartanegara	70,71	71,20	1,65
Kutai Timur	69,79	70,39	2,00
Berau	72,02	72,26	0,84
Penajam PU	68,07	68,60	1,67
Mahakam Ulu	63,81	64,32	1,41
Balikpapan	77,53	77,93	1,79
Samarinda	77,84	78,39	2,46
Bontang	78,34	78,58	1,10
Kalimantan Timur	73,21	73,82	2,28

Sumber : BPS Kota Bontang

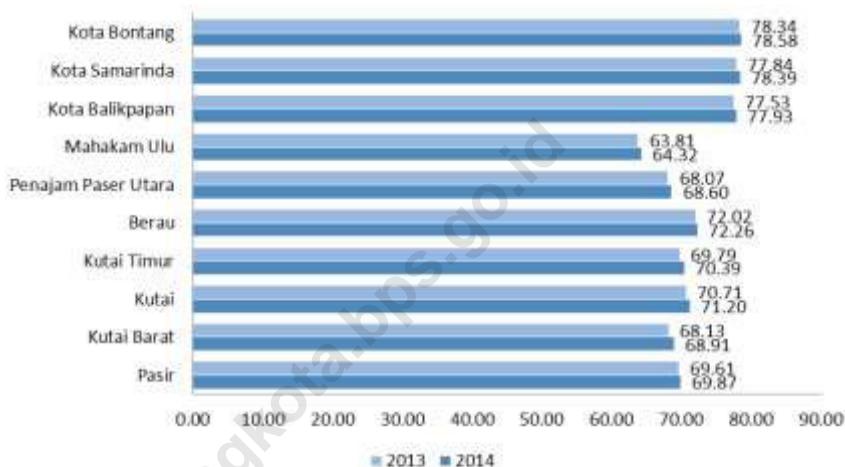
Tingkat kecepatan perkembangan IPM Kota Bontang menuju angka IPM ideal (100 persen) dari tahun 2012 ke tahun 2013 adalah sebesar 1,10 persen.

Nilai tersebut sedikit lebih rendah dari kecepatan perkembangan IPM yang diraih oleh beberapa kabupaten/kota lain, bahkan Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Barat dapat mencapai angka reduksi *shortfall* dua kali lipat dari Kota Bontang yakni 2,46. Hal ini tentu perlu dijadikan pembelajaran kedepan agar dapat lebih baik lagi, mengingat Kota Bontang adalah peringkat pertama dalam angka IPM namun angka reduksi masih cukup rendah dibanding beberapa kota/kabupaten lain.

4.4 KETERBANDINGAN IPM ANTAR KAB/KOTA DI PROVINSI KALTIM

Secara umum tidak terjadi perubahan peringkat yang signifikan dalam susunan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur pada tahun 2014 apabila dibandingkan dengan peringkat pada tahun 2013. Empat peringkat teratas diduduki oleh Kota Bontang, Samarinda, Balikpapan, dan Berau. Perbandingan IPM kabupaten/kota selama dua tahun terakhir digambarkan oleh Grafik 11 berikut ini.

Grafik 11. Keterbandingan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2013—2014



Secara rata-rata dari 10 kabupaten/kota, angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 72,04 tahun. Angka harapan hidup tertinggi dicapai oleh Kota Balikpapan yaitu 73,94 tahun, sedangkan angka harapan hidup terendah dicapai oleh Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu 70,48 tahun. Sementara itu angka harapan hidup Kota Bontang berada di posisi kedua yaitu sebesar 73,68 tahun. Dengan capaian ini, angka harapan hidup Kota Bontang telah melampaui angka harapan hidup Kalimantan Timur sebesar 0,06 tahun.

Sedangkan jika dilihat komponen Angka Harapan Lama Sekolah, rata-rata 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12,72 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bontang pada tahun 2014 menempati peringkat keenam di antara 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur dengan nilai sebesar 12,68 tahun, Sementara itu urutan terakhir diduduki oleh Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai angka Harapan Lama Sekolah sebesar 11,69 tahun.

Selanjutnya, komponen rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 adalah sebesar 9,04 tahun, atau sudah melebihi target pendidikan dasar 9 tahun. Posisi tiga besar ditempati oleh daerah yang berstatus kota dengan rata-rata penduduk berusia 15 tahun ke atas sudah mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 1 SLTA. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bontang ada 10,35 tahun telah membawa Kota Bontang menduduki peringkat kedua di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggal satu peringkat dari Kota Balikpapan yang berada di posisi puncak dengan rata-rata lama sekolah sebesar 10,41 tahun.

Berikutnya pada komponen pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan atau Paritas Daya Beli

(*Purchasing Power Parity = PPP*), memungkinkan dilakukan perbandingan harga-harga riil antar provinsi dan antar kabupaten/kota mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menaikkan atau menurunkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi per kapita yang disesuaikan. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu provinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di DKI Jakarta. Pada Tabel 21 di bawah terlihat bahwa nilai PPP Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 11.019 rupiah. Nilai PPP tertinggi di Kalimantan Timur pada tahun 2014 dicapai oleh Kota Bontang yaitu sebesar 15.878 rupiah, diikuti oleh Kota Samarinda sebesar 13.538 rupiah dan Kota Balikpapan sebesar 13.439. Nilai PPP terendah diraih oleh Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu sebesar 7.071 rupiah. Perbandingan nilai masing-masing komponen pembentuk IPM seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur pada tahun 2014 ditampilkan oleh Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3. Indikator Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Dirinci menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2014

Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	Pengeluaran per kapita riil disesuaikan (Rp)	IPM	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pasir	71,88	12,63	7,99	9.706	69,87	7
Kutai Barat	72,03	12,14	7,98	9.262	68,91	8
Kutai Kartanegara	71,50	13,24	8,46	9.984	71,20	5
Kutai Timur	72,37	12,42	8,60	9.484	70,39	6
Berau	71,21	12,96	8,53	11.471	72,26	4
Penajam PU	70,48	11,69	7,46	10.807	68,60	9
Mahakam Ulu	71,12	11,87	7,15	7.071	64,32	10
Balikpapan	73,94	13,43	10,41	13.439	77,93	3
Samarinda	73,63	14,16	10,26	13.538	78,39	2
Bontang	73,68	12,68	10,35	15.878	78,58	1
Kalimantan Timur	73,62	13,17	9,04	11.019	73,82	3

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Prinsip pembangunan manusia adalah azas pemerataan yang diimplementasikan dalam berbagai program pembangunan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan terjadi peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk yang diperoleh melalui proses pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan manusia sebagai subsistem pembangunan diharapkan dapat menimbulkan keragaman dan diversifikasi dalam kegiatan masyarakat. Makin beragam kegiatan masyarakat makin besar pula kemampuan mereka dalam mengembangkan pilihan-pilihannya. Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia akan dapat meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui kemampuan mengelola sumber daya untuk memperoleh hasil yang optimal.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM dijadikan sebagai salah satu ukuran utama dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yakni menjadi kunci bagi

terlaksananya perencanaan pembagunan daerah. Pertimbangan lain adalah IPM dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu sebagai alat ukur pemantauan status pembangunan manusia, karena IPM sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Pendekatan hak dalam pembangunan manusia selaras dengan pengembangan dan prakarsa Strategi Penghapusan Kemiskinan (Bebas Kemiskinan) atau Program Strategi Penghapusan Kemiskinan Nasional (SPKN) di tingkat Nasional, dan upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Milenium (MDGs)

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Tahun 2014 adalah:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia atau status tiga kemampuan dasar penduduk, yakni berumur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, berpengalaman dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.
2. Angka IPM pada tahun 2014 mengalami perubahan metodologi penghitungan, alasannya adalah (1)

beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan serta PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. (2) Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

3. Melalui penghitungan IPM metode baru, Kota Bontang dikukuhkan sebagai jawara dalam hal keberhasilan pembangunan manusia di Kalimantan Timur selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014. Angka IPM Kota Bontang pada tahun 2014 menembus angka 78,58 poin yang mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak 2010.
4. Pada tahun 2014 seluruh komponen IPM Kota Bontang mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2013. Komponen angka harapan hidup meningkat sebesar 0,01 %, komponen angka Harapan Lama Sekolah meningkat sebesar 1,44 %, komponen rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,08 %, dan pengeluaran per kapita disesuaikan naik sebesar 0,37%.

5. Peningkatan angka harapan hidup di Kota Bontang menunjukkan taraf kesehatan penduduk Kota Bontang yang makin baik. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jamkesda dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secara dini.
6. Di bidang pendidikan, Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bontang mencapai nilai sebesar 12,68 Tahun. Angka ini mengandung makna bahwa dari seluruh penduduk Kota Bontang berusia 7 tahun ke atas, mempunyai harapan lama sekolah 12 tahun 8 bulan. Angka ini setingkat Semester 1 atau 2 pada perguruan Tinggi. Hal tersebut dapat terwujud antara lain karena adanya kebijakan Pemerintah Kota Bontang yang membebaskan biaya pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat SLTA. Implikasi lainnya adalah rata-rata lama sekolah Kota Bontang yang terus meningkat hingga mencapai 10,35 tahun pada tahun 2014. Dengan kata lain, secara rata-rata penduduk Kota Bontang telah menempuh pendidikan 10 tahun 4 bulan lebih atau rata-rata setingkat kelas 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

7. Di bidang ekonomi juga terjadi peningkatan pendapatan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan. Hal itu dapat dilihat pada kenaikan rata-rata pengeluaran riil per kapita. Pada Tahun 2013 rata-rata pengeluaran riil per kapita Kota Bontang adalah sebesar 15.820 rupiah, kemudian meningkat menjadi 15.878 rupiah di tahun 2014.
8. Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang di tahun 2014 meningkat sebesar 0,30 poin dari tahun lalu sehingga mencapai nilai 78,58.

5.2 SARAN

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah memberikan keleluasaan dan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing, termasuk keleluasaan dan kewenangan dalam pembelanjaan anggaran. Kesempatan ini diberikan kepada DPRD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/ kota.

Upaya desentralisasi tersebut membangkitkan kekhawatiran bahwa pemerintah daerah akan mengabaikan pembangunan sosial jangka panjang karena mereka akan cenderung untuk mengarahkan

perhatian pada kegiatan ekonomi jangka pendek yang menghasilkan uang. Oleh karenanya, pemanfaatan konsep pembangunan manusia sebagai alat advokasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan menjadi sangat penting.

Salah satu cara menjamin bahwa desentralisasi akan berjalan untuk kepentingan semua rakyat adalah dengan membuat kesepakatan sosial baru (*new social compact*), suatu kesepakatan bahwa semua warga negara Indonesia berhak atas suatu standar pembangunan manusia yang menjadi kesepakatan nasional. Misalnya, mereka berhak untuk bisa membaca dan menulis, berhak untuk hidup sehat, berhak untuk bisa mendapat penghasilan yang layak, dan berhak untuk mendapat rumah yang memadai.

Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang sangat luas melingkupi hampir seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari kebebasan untuk menyatakan pendapat, untuk mencapai kesetaraan jender, untuk memperoleh pekerjaan, untuk menjaga gizi anak, untuk bisa membaca dan menulis. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lain pihak mempunyai cakupan yang lebih sempit. Meskipun IPM mencoba untuk mengukur tingkat pembangunan manusia, indeks ini hanya mampu mengukur sebagian saja. Hal ini disebabkan oleh berbagai aspek seperti tingkat

partisipasi masyarakat atau kesehatan mental sangat sulit untuk diukur dan dikumpulkan datanya.

Oleh karenanya pihak daerah harus lebih memfokuskan diri pada konsep pembangunan manusia secara luas serta penerapan prinsip-prinsip utamanya, daripada hanya memfokuskan pada indeks semata. Artinya, dalam setiap aspek pekerjaannya, pejabat dan pegawai daerah harus mengutamakan manusianya dengan meletakkan manusia bukan sebagai alat pembangunan tetapi sebagai tujuan utama dari pembangunan. Misalnya, daripada meningkatkan pendidikan dan menjaga kesehatan masyarakat hanya untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih baik atau untuk meningkatkan perekonomian, selayaknya pejabat dan pegawai daerah membantu masyarakat di daerahnya untuk menjalankan kehidupan yang lebih berarti dan memuaskan. Oleh karena itu, semua kegiatan mulai dari pembangunan jalan, pemberian lisensi penambangan, atau pembangunan fasilitas kesehatan baru harus bertujuan untuk memperluas kesempatan dan pilihan yang dimiliki masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, namun tidak berarti anti pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir.

Pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Dalam jangka pendek, dengan pengeluaran publik yang teratur, suatu daerah dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan manusia, meskipun tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti. Meskipun parameter pembangunan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai arti penting bagi pembangunan manusia, namun dalam jangka panjang tidak akan ada kemajuan yang berkelanjutan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi.

Perhatian pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada aspek pendistribusiannya. Jadi bukan hanya masalah berapa besar pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan yang seperti apa. Perhatian harus lebih ditujukan pada struktur dan kualitas pertumbuhan tersebut, sehingga dapat menjamin bahwa pertumbuhan diarahkan untuk mendukung perbaikan kesejahteraan manusia baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Perhatian utama dari kebijakan pembangunan haruslah ditekankan pada bagaimana keterkaitan tersebut dapat diciptakan dan diperkuat.